



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan sehingga pembuatan Laporan Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 telah selesai dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perindustrian, BPPSI Pekanbaru berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan survei persepsi korupsi melalui kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi pengguna layanan BPPSI Pekanbaru terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi. Melalui Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru tahun 2019, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan BPPSI Pekanbaru.

Kami mengharapkan saran serta kritikan yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan pembuatan laporan ini dan juga dalam penyelenggaraan layanan jasa di lingkungan BPPSI Pekanbaru. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan menjadi evaluasi khususnya bagi kami untuk melakukan upaya perbaikan pada tahun berikutnya.

Pekanbaru, 31 Desember 2019

Kepala,



Fathullah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Metodologi.....	3
Bab III Analisis Data.....	4
Bab IV Penutup.....	5
Lampiran.....	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian di wilayah provinsi Riau memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk juga lembaga pemerintah dan instansi lainnya. Dalam rangka memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh BPPSI Pekanbaru tetap transparan dan sesuai dengan ketentuan, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan SKP serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPPSI Pekanbaru.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada BPPSI Pekanbaru ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
8. Permenperin Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.

BAB II METODOLOGI

2.1 Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BPPSI Pekanbaru dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (*e-survey*) sebagai alat pengumpul data kepada pelanggan BPPSI Pekanbaru. Pelanggan yang dimaksud adalah setiap individu atau instansi yang menggunakan jasa pengujian, konsultansi, *workshop*, magang, dan penelitian di BPPSI Pekanbaru.

Persiapan survey:

1. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei persepsi korupsi.
2. Membangun *e-survey* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
3. Mengumpulkan seluruh alamat email atau kontak pelanggan BPPSI Pekanbaru
4. Membuat database calon responden survei.
5. Menyampaikan informasi kepada pelanggan untuk berkenan mengisi *e-survey*.

Proses survey:

1. Pelaksanaan *e-survey* dilakukan dalam jangka waktu Januari-Desember 2019, tergantung dengan selesainya proses pelayanan jasa yang dilakukan pelanggan di BPPSI Pekanbaru.
2. Melakukan penyebaran surat/informasi *e-survey* kepada pelanggan untuk mengisi kuesioner persepsi korupsi.
3. *E-survey* dilakukan dengan mengakses link: <https://forms.gle/wfLdkCHTrKuAd9J79>.
4. Petugas PPID BPPSI Pekanbaru melakukan pengecekan secara berkala pada sistem *e-survey* (di website BPPSI Pekanbaru) untuk mengetahui perkembangan *e-survey*.

2.2 Tim Survei

Tim Survei persepsi korupsi di lingkungan BPPSI Pekanbaru terdiri atas:

•Penanggungjawab	:	Kepala BPPSI Pekanbaru
Ketua	:	Kepala Subbagian Tata Usaha
Anggota	:	1. Wiko Putrawan 2. Eka Syahputra 3. Hainun Besari 4. Siti Adawiyah

2.3 Variabel Survei

Penyusunan Indeks Survey Persepsi Korupsi di BPPSI Pekanbaru menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang diakses secara *online* oleh pelanggan (*e-survey*), dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur, yaitu:

1. Prosedur pelayanan;
2. Perilaku Petugas di luar prosedur yang ditetapkan;

3. Praktek pencaloan/perantara;
4. Perilaku diskriminatif;
5. Pungutan liar;
6. Permintaan imbalan;
7. Hadiah;
8. Produk / jasa layanan;
9. Diskriminasi penanganan pengaduan.

2.3 Karakteristik Responden

Responden adalah seluruh pelanggan yang menggunakan jasa BPPSI Pekanbaru selama tahun 2019.

2.4 Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

2.5 Kategorisasi Hasil Pengukuran Survei Persepsi Korupsi

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam survei ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
1,76 – 2,50	43,76 – 52,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III ANALISIS DATA

3.1 Responden Survei Persepsi Korupsi

Responden berjumlah 28 (dua puluh delapan) pelanggan yang mengisi kuesioner yang terdiri dari pelaku IKM, unit pendidikan, dan instansi pemerintah daerah.

3.2 Interval Indeks Persepsi Korupsi

Nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat BPPSI Pekanbaru adalah:

- | | |
|--|--------|
| 1. Prosedur pelayanan | : 3,57 |
| 2. Perilaku Petugas di luar prosedur yang ditetapkan | : 3,36 |
| 3. Praktek pencaloan/perantara | : 3,61 |
| 4. Perilaku diskriminatif | : 3,61 |
| 5. Pungutan liar | : 3,71 |
| 6. Permintaan imbalan | : 3,61 |
| 7. Hadiah | : 3,61 |
| 8. Produk / jasa layanan | : 3,57 |
| 9. Diskriminasi penanganan pengaduan | : 3,79 |

3.3 Mutu Pelayanan BPPSI Pekanbaru

Mutu pelayanan di BPPSI Pekanbaru adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan	3,57	A
2	Perilaku Petugas di luar prosedur yang ditetapkan	3,36	A
3	Praktek pencaloan/perantara	3,61	A
4	Perilaku diskriminatif	3,61	A
5	Pungutan liar	3,71	A
6	Permintaan imbalan	3,61	A
7	Hadiah	3,61	A
8	Produk/ jasa layanan	3,57	A
9	Diskriminasi penanganan pengaduan	3,79	A

3.4 Nilai Rata-Rata

Melihat hasil tabulasi dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh nilai rata-rata 3,60 dan mutu pelayanan adalah Bersih dari Korupsi.

BAB IV PENUTUP

Hasil tabulasi dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan dalam Survei Persepsi Korupsi tersebut diperoleh nilai rata-rata per unsur adalah 3,60 dan nilai Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru adalah A (Bersih dari Korupsi).

Walaupun mendapatkan persepsi Bersih dari Korupsi dari pelanggan BPPSI Pekanbaru, masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada seluruh pelanggan BPPSI ke depan antara lain:

1. Terus melakukan review dan tindak lanjut terhadap SOP pelayanan yang ada, dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan;
2. Komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pelanggan BPPSI Pekanbaru, agar berkenan mengisi survey persepsi korupsi (meningkatkan jumlah responden).
3. Menambahkan media komunikasi berupa Whatsapp untuk komunikasi yang lebih mudah terkait dengan pelayanan BPPSI Pekanbaru.

LAMPIRAN

Laporan Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru

Tahun Anggaran 2019

Lampiran 1 Unit Pelayanan Publik BPPSI Pekanbaru



Lampiran 2 Halaman Survei Persepsi Korupsi di Website BPPSI Pekanbaru

The screenshot shows the website of the Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (BPPSI). The header includes the logo of the Kementerian Perindustrian and the text 'BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU'. A navigation menu at the top contains links for BERANDA, PROFIL, PELAYANAN JASA, PENGEMBANGAN PRODUK, INFORMASI PUBLIK, ZONA INTEGRITAS, and LINKS. The main content area features a large heading 'Survei Indeks Persepsi Korupsi' and a sub-heading 'Survei Indeks Persepsi Korupsi' within a white box. The text in the box is as follows:

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

- Pelayanan yang Bebas dari Korupsi -

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat,

Salah satu upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah melaksanakan reformasi birokrasi melalui perbaikan layanan publik di instansi kerja. Setiap tahun, BPPSI Pekanbaru melakukan survei melalui - Survei Indeks Persepsi Korupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Berah dan Melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara kiranya berkenan mengisi Kuesioner di bawah ini. Pertanyaan sengaja dirancang sesederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu kami dalam meningkatkan pelayanan publik kami.

Lampiran 3 Kuesioner e-survey Persepsi Korupsi

Survey Indeks Persepsi Korupsi

Survei Indeks Persepsi Korupsi

1. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

2. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

3. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

4. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

5. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

6. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

7. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

8. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

9. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

10. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

11. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

12. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

13. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

14. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Anda menimbulkan persepsi korupsi?

BPPSI